

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Proses Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sudah terlaksana namun belum optimal. Pada tahap perencanaan belum efektif untuk mencapai target realisasi penerimaan tahunan. Pada tahap pelaksanaan belum optimal dalam hal penerimaan realisasi yang belum memenuhi target capaian sebagaimana yang telah direncanakan dalam rencana tahunan. Pada tahap monitoring dan evaluasi sudah dilakukan melalui rapat akan tetapi belum menunjukkan kesesuaian antara capaian pelaksana dengan apa yang di targetkan dalam perencanaan.
2. Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo yaitu pertama, komunikasi yang lancar dan baik antara semua pihak yang terlibat. Kedua, sikap pelaksana yang atusias dan semangat, dan sumber daya dilihat dari wewenang. Sedangkan faktor penghambat yaitu pertama, sumber daya baik keterbatasan jumlah sumber daya manusia, anggaran, fasilitas masih terbatas. Kedua, struktur birokrasi yang belum ada *SOP* atau kurang jelas.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, terdapat beberapa hal yang perlu disarankan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam tahap perencanaan, pihak yang terlibat agar memperhitungkan secara jelas aspek target pendapatan yang dimiliki oleh Kecamatan Sipatana baik besaran tarif maupun target capaian, sehingga realisasi penerimaan bisa mencapai target yang ditetapkan dan juga harus di dukung oleh *Bottom Up* dari bawah sehingga apa yang ditargetkan sesuai dengan kondisi masyarakat bawah.
2. Dalam tahap sumber daya, meningkatkan sumber daya manusia secara memadai dengan melakukan rekrutmen, pelatihan, menambah sarana prasarana, dan mengalokasikan anggaran termasuk insentif untuk para kolektor.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Cita Intrans Selaras Wisma Kalimetro, Joyosuko Metro 42 Malang.
- Agustino, L. (2016). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bambang, S. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Chazali, S. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. Cv. The Journal Publishing, Yogyakarta, Indonesia.
- Hariyanto Erie Dan Humaidy Ali. (2017). *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Zakat Perusahaan Pada Lembaga Keuangan Syaria'ah*. Surabaya: Duta Media Publishing.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Perilaku Birokrasi Dalam Realita UNG Press*
- Keban, Y. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep,Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Marianti, R. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: Cv Sah Media.
- Prijambodo. (2014). *Monitoring Dan Evaluasi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Rinzani, Mohammad Debby. (2019). *Pengelolaan Sanitasi Permukiman Wilayah Perkotaan Dengan Pendekatan Teknokratik Dan Partisipatif (Teknoparti)*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Sobirin, sore uddin. (2017). *kebijakan publik*. Makassar: Cv sah media.
- Surya, D. (2018). *Hasil Evaluasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*. Jakarta: Cv Jakad Publishing.

## JURNAL

- Adi, E. A., & Djamaludin, S. (2020). Implementasi Kebijakan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Kota Serang. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 2(1), 50-61.
- Amelia, R., & Yuliani, F. (2017). *Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb P2) sebagai Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Baok, R. T. L., Sasongko, T., & Rifa'i, M. (2020). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 81-89.
- Dunggio, T. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 13-26.
- Hutabalian, I. L. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan: Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan. *Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan*, 9(1).
- Ilato, R., & Mozin, S. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Sentral Kota Gorontalo. *Jambura Journal of Administrative and Public Service*, 1(1), 1-10.
- Irawan, R., Anggraini, N., Dewi, I. K., Prana, I., & Wijaya, D. (2020). Analisa Tinjauan Pelaksanaan Administrasi Penjualan Produk Formalin Pada Pt Gochem Globalindo Jakarta Barat. *Jurnal Akrab Juara*, 5(4), 58-67.
- Maria, K., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).

- Rahma, Z. A. Systematic Literature Review Terhadap Kebijakan Publik dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik.
- Ramadhanti, I., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 9-21.
- Sandi, K., Jonsa, A., Ardiansyah, A., Salam, R., & Novirasmita, N. (2020). Efektivitas Uptd-Pbb-P2 Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 129-139.
- Tahir Arifin Dr, M.si. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung :PT Alfabeta Bandung, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Tambingon, V. V., Manossoh, H., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pbb P2) Serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2017. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).

## **UNDANG-UNDANG**

- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004